

STRATEGI KEBUDAYAAN NU

Yahya Ma'shum

Wakil Ketua PP Lakpesdam NU dan Penasehat IKA-PMII

Email: yahyamashum@yahoo.com

Membicarakan Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama' (NU), tidak bisa lepas dari konteks kehadirannya dalam belantika iklim sosial-politik nasional, regional, dan internasional. Yang demikian itu karena NU tidak muncul tiba-tiba, apalagi hanya karena reaksi atas situasi sosial politik atau sosial budaya-keagamaan tertentu. NU merupakan wadah bersama mayoritas warga yang tidak tertampung oleh kelompok-kelompok Islam awal tahun 1900-an. Para warga tersebut telah menyelami nilai-nilai keislaman yang telah diwarisi dari generasi awal hingga generasi mereka. Nilai-nilai keislaman itu terinternalisasi dengan begitu rapi dan efektif di pesantren. Karena itulah maka pesantren kemudian menjadi lumbung kader-kader yang kelak menjadi bagian dari Jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyah Nahdlatul Ulama. Apa sesungguhnya yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama ?

Para *founding fathers* tentu telah memberikan argumentasi maupun alasan-alasan strategis kenapa NU harus ada. Berbagai rintisan program mengawali terbentuknya Ormas NU yang di kemudian hari menjadi salah satu Ormas Islam terbesar di tanah air ini. Rintisan tersebut antara lain di bidang ekonomi yaitu memperkuat komitmen ekonomi kerakyatan dalam komunitas "Nahdlatul Tujjar". Sedang di



bidang politik misalnya ada usaha dalam rangka pendalaman wawasan politik kerakyatan dan cinta tanah air dalam komunitas "Nahdlatul Wathan". Program-program rintisan inilah yang menjadi landasan awal dari cita-cita besar NU. NU memang bukanlah seperti pasar *tiban* yang datang dan pergi mengikuti jadwal dan model *event*. Tetapi NU dilahirkan untuk meraih cita-cita bersama, yang seperti halnya sakral.

Cita-cita NU ini terlihat dalam Mukadimah Anggaran Dasar NU. Di sana tersurat beberapa poin mengapa NU didirikan dan merupakan cita-cita bersama para warganya. *Pertama*, kehadiran NU adalah dalam rangka menjunjung tinggi semangat Islam *rahmatan lil 'alamin*. Semangat ajaran Islam yang mengayomi semua umat lintas etnik dan agama. Para pendiri NU sangat sadar bahwa Indonesia dihuni beragam etnik dan agama yang melebur dalam wadah yang bernama Indonesia. Oleh karena itu, sangat realistis bila kehadiran NU adalah dalam kerangka menebar rahmat bagi semesta.

Kedua, semangat Islam *rahmatan lil 'alamin* itu termanifestasi dalam rumusan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Aswaja). NU merupakan pelembagaan dari perjuangan ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Indonesia dalam melakukan

dakwah Islam dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini artinya, nilai-nilai Aswaja merupakan nilai penting yang senantiasa dijaga dan diperjuangkan oleh NU.

Ketiga, meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan warganya sebagai bagian mutlak meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini artinya, kesejahteraan warga dengan memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi cita-cita perjuangan NU. Para pendiri NU sangat sadar bahwa terbentuknya NU tidak lepas dari semangat lembaga-lembaga yang mengawali terbentuknya NU. Nahdlatul Tujjar merupakan lembaga awal yang turut menginspirasi semangat NU dalam mewujudkan warga yang berprestasi (*khair ummah*).

Keempat, mewujudkan dan mempertahankan NKRI. Sebagai bagian dari bangsa, NU terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan sekaligus mengisinya adalah salah satu tekad terbentuknya NU. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa ini harus dipertahankan secara kolektif pula. Dan bagi NU, NKRI adalah harga mati yang senantiasa dipertahankan.

Kelima, mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan di kalangan umat Islam), *ukhuwah wathaniyyah* (persaudaraan sebangsa), dan *ukhuwah insaniyyah* (persaudaraan atas nama kemanusiaan). Prinsip ini merupakan cita-cita terbentuknya NU yang diletakkan sendi-sendinya oleh para ulama. Perbedaan bendera organisasi bukanlah hambatan untuk terus memperjuangkan Islam; perbedaan etnik dan agama juga bukan alasan untuk meretakkan jalinan berbangsa dan bernegara; perbedaan warna

kulit dan tingkat ekonomi juga bukan menjadi argumen untuk meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Semuga itu dibingkai dalam prinsip persaudaraan seagama, sebangsa, dan atas nama kemanusiaan.

Spirit semacam itu yang ditekankan para *founding fathers* NU ketika pada mulanya memutuskan membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berpijak dari lima poin di atas diyakini bahwa cita-cita bersama ini adalah "*qathi'i*" –tetap, tidak bisa diutak-atik-dan langgeng karena dinilai "*shalihun likulli zaman wa makan*", karena cita-cita NU bukanlah cita-cita primordial-komunal dan temporal. Menggunakan bahasa Betawi, cita-cita NU untuk *kite*, bukan cuma untuk *gue* atau *elo*. Haluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) NU bukan untuk memisahkan antara "kami" dengan "mereka". Sebab ruh dari Aswaja adalah Islam *rahmatan lil 'alamin* dengan karakter gerakan yang mengedepankan sikap *tawazun*, *tawasuth*, dan *tasamuh*. Yang tak kalah pentingnya (*dharurah*) adalah, komitmen NU untuk menjaga bangsa dan negara, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala isi dan karakternya. Lalu bagaimanakah NU merancang dan mewujudkan cita-cita itu?

Untuk ini NU musti memiliki strategi kebudayaan. Dan bagaimana strategi kebudayaan dikembangkan dan dilaksanakan? Harus dipahami bahwa kebudayaan dan pemahaman kebudayaan itu bergerak dan berubah. Pemahaman akan dinamisme kebudayaan inilah yang mestinya dipahami oleh NU bahwa strategi yang digunakannya pun harus terus berubah dari waktu ke waktu. Tentu saja budaya untuk berubah kepada yang lebih baik sama ditonjolkan dengan semata-mata memperta-

hankan budaya lama yang baik. Diktum klasik yang sering dijadikan pedoman ber-NU, "Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik," harus seiring sejalan. Bukan semata-mata berhenti pada upaya konservasi (*al-muhafadzah*) semata, melainkan juga pada 'kreasi dan inovasi baru' (*al-akhdzu bil jadid*) dalam mengembangkan NU.

Hal lain yang penting adalah merencanakan, mengonsep, atau menyusun agenda-agenda penting organisasi. Hal ini adalah konsekuensi dari pemahaman bahwa kebudayaan itu hasil cipta dan karsa manusia. Kecuali kita berniat pasrah dan *membebek* kepada budaya yang diciptakan *the others*. NU musti bisa berkaca dan mengambil pelajaran dari perjalanan bangsa di masa lalu. Misalnya, pemerintahan Indonesia di masa lampau sukses memaknai amanat pasal 32 UUD 1945 (sebelum diamandemen) secara lafdziyah sebagai kewajiban memajukan kebudayaan nasional. Bagi pemerintahan saat itu, kebudayaan nasional adalah segala pemikiran, cipta karsa manusia Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai ini kemudian diwujudkan dalam tindakan-tindakan politik kebudayaan. Misalnya menentukan tayangan televisi mana yang boleh dan tidak boleh, film-film apa saja yang bisa diputar di bioskop atau televisi, berita-berita apa saja yang boleh disiarkan, dan sebagainya. Bahkan sampai pada bentuk kebudayaan yang paling subtil dan ideal seperti pikiran pun ingin dikendalikan pemerintah melalui doktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Nah, fardhu hukumnya bagi NU untuk memiliki strategi kebudayaan seperti itu.

Sebab, NU sudah memiliki cita-cita maupun nilai-nilai yang disepakati bersama, yaitu Ahlussunnah Wal Jama'ah ditambah tradisi Nusantara yang teramat kaya. NU juga sudah membentuk perangkat organisasi, yang mungkin paling lengkap di antara Ormas sedunia. Ada badan otonom, lembaga, lajnah dll, yang seharusnya satu sama lain dapat saling berinteraksi dan bersinergi. Karena itu misalnya bagaimana NU dan pesantren saling menyokong visi dan misi? Bagaimana GP Anshor sejalan dengan Muslimat, Fatayat, dll? Bagaimana Lembaga Bahtsul Masail (LBM) sevisi dengan lembaga lainnya di NU semisal Lembaga Pendidikan Ma'arif, Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi), Lembaga Pertanahan dan Pertanian NU (LP2NU), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), dll?

Jamiyyah Diniyah Ijtima'iyah Nahdlatul Ulama sudah tidak boleh abai dengan strategi kebudayaan. Sepuluh tahun terakhir ini, NU terombang-ambing oleh iklim sosial politik negeri ini. Kebudayaan dan tradisi NU sudah tercabik-cabik, di antaranya, bukan tidak mungkin, oleh para jama'ahnya sendiri, dari level pengurus hingga anggota. Strategi kebudayaan akan mencegah disintergrasi budaya dalam artian yang sangat luas (makro), mencangkup segala aspek kehidupan: ilmu pengetahuan, agama, politik, ekonomi, seni, bahasa, dll. Strategi kebudayaan telah menjadi kebutuhan mutlak bagi ormas yang jumlah warganya terbesar dibandingkan ormas Islam lainnya. Dalam konteks ini pula integritas anggota dan pengurus NU sejatinya mencerminkan nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh organisasi. Adalah

tidak mungkin mencapai cita-cita besar sebagaimana diurai di awal tanpa komitmen dan konsistensi jama'ah (pengurus dan anggota) NU. Singkatnya, integritas jama'ah menjadi jaminan ke mana organisasi yang dibangun para ulama ini dilabuhkan.

Di samping itu, pilar penting lainnya adalah perlunya komunikasi untuk mencapai konsensus demi menemukan hal-hal yang baru. Termasuk juga komunikasi antar warga nahdliyin, baik antara sesepuh dan pengurus NU dengan konstituennya maupun sebaliknya. Dalam komunikasi yang sehat mensyaratkan kesetaraan dan keterbukaan. Memang, komunikasi yang setara dan terbuka membuka peluang untuk konflik. Tapi tidak apa-apa, karena konflik itu *sunatullah*. Tinggal bagaimana agar konflik menjadi semacam majlis "bahstul masail" yang di dalamnya terdapat dinamisasi, memungkinkan perbedaan, dan kesadaran bahwa konflik adalah jalan menuju manusia yang utuh.

Konflik musti melahirkan kreativitas, bukan destruktifitas. Konflik yang sehat dan dewasa akan berbuah kematangan dan soliditas gerakan. Hal yang naas akan terjadi bila komunikasi disertai ketidakpercayaan dan prasangka antarkomunikator. Jalan komunikasi akan *mampet* bila terjadi pemaksaan kehendak dan pemahaman. Pemaksaan sama sekali tidak memberikan sumbangan atas problem kemanusiaan dan kebudayaan.

Patut dijadikan pelajaran bagaimana KH. Wahab Chasbullah (Mbah Wahab) senantiasa melakukan komunikasi yang intensif dengan lainnya, bahkan tidak

jarang terjadi perdebatan sengit. Tapi akhirnya perdebatan itu pun diakhiri dengan sikap *legowo* dari masing-masing yang berdebat. Ini juga yang kemudian menjadi prinsip Mbah Wahab yang selalu mengingatkan jama'ahnya sambil mengutip hadis Nabi Muhammad Saw yang mengatakan bahwa bukanlah termasuk golongan kami siapa saja yang tidak menghormati yang sepuh (*lam yuwaqqir kabirana*) dan tidak mengasihi yang muda (*lam yarham shaghirana*). Ini artinya, komunikasi dibangun atas pengakuan, penghargaan, penghormatan. Yang muda menghormati yang tua dan yang muda merasa di-*emong* oleh yang tua. Dari sini, kesenjangan generasi tidak mengganggu komunikasi antara keduanya. Malah saling bersinergi dalam mewujudkan *jam'iyah* yang solid dan besar berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah dibangun para pendirinya.

Ormas seperti NU ini tidak perlu khawatir untuk mengembangkan strategi kebudayaan itu, yang kadang dimaknai bahwa gagasan strategi kebudayaan itu sepertinya bertujuan untuk memposisikan manusia sebagai obyek kebudayaan. Karena NU tetap menyokong warganya sebagai subyek (*fail*) yang otonom dan nilai-nilai yang terkandung dalam strategi kebudayaan NU adalah kesepakatan bersama, baik yang tertulis ataupun tidak. Nah dari sinilah mimpi besar para ulama pendiri NU itu dipertaruhkan. Teladan dan petuah-petuhannya telah menjadi bagian kita dalam berjam'iyah. Apakah kita akan membiarkan mimpi itu tetap menjadi mimpi, atau mengubahnya menjadi kenyataan? ❁